



Efektivitas Program Kebijakan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo

Fajar Muharram

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
fajarmuharram@umsida.ac.id

Abstract

This research aims to determine the effectiveness of priority village policy programs in accelerating stunting reduction in Sidoarjo Regency. Referring to Siagian's theory of effectiveness which includes the role of government as a stabilizer, innovator, modernizer and implementer, this research examines how these roles are implemented in the local context. The method used is qualitative with a descriptive approach. Data was obtained through literature studies which included policy documents, government reports and relevant scientific articles. The technique for determining informants was carried out purposively, by selecting informants who had relevant experience and knowledge regarding the implementation of stunting programs at the village level, namely the Sidoarjo District Health Service. The research results show that the government's role as a stabilizer is reflected in the political and social stability that supports the desires of these programs. As an innovator, the government has succeeded in introducing various new initiatives that improve the quality of children's nutrition and health. The role as a modernizer can be seen from efforts to modernize health and sanitation facilities, as well as educating the public. As implementer, the government shows high commitment by directly implementing various program interventions. This research concludes that a holistic approach that integrates these four government roles has shown significant effectiveness in reducing stunting rates in Sidoarjo Regency. From the series of programs and policies implemented in Sidoarjo Regency to accelerate stunting reduction, holistic effectiveness has been implemented through various program implementations. such as Stabilizers to expand the scope of interventions, Innovators to integrate cross-sector activities, and Modernizers to improve data and information management. As the implementer itself, Sidoarjo Regency also implements regulations and establishes a responsible team, stunting programs can produce a significant positive impact in preventing stunting.

Keywords: *Stunting Program; Policy; Priority Villages*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program kebijakan desa prioritas dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo. Mengacu pada teori efektivitas oleh Siagian yang mencakup peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, dan pelaksana, penelitian ini mengkaji bagaimana peran-peran tersebut diimplementasikan dalam konteks lokal. Metode yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup dokumen-dokumen kebijakan, laporan pemerintah, serta artikel-artikel ilmiah yang relevan. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, dengan memilih informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan terkait implementasi program stunting di tingkat desa, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai stabilisator tercermin dalam stabilitas politik dan sosial yang mendukung keberlanjutan program-program ini. Sebagai inovator, pemerintah berhasil memperkenalkan berbagai inisiatif baru yang

meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak. Peran sebagai modernisator terlihat dari upaya modernisasi fasilitas kesehatan dan sanitasi, serta edukasi kepada masyarakat. Sebagai pelaksana, pemerintah menunjukkan komitmen tinggi dengan pelaksanaan langsung berbagai program intervensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan holistik yang mengintegrasikan keempat peran pemerintah ini telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Dari rangkaian program dan kebijakan yang diimplementasikan di Kabupaten Sidoarjo untuk percepatan penurunan stunting, bahwa efektivitas yang holistik telah diadopsi melalui berbagai penerapan program seperti Stabilisator untuk memperluas cakupan intervensi, Inovator untuk mengintegrasikan kegiatan lintas sektor, dan Modernisator untuk meningkatkan manajemen data dan informasi. Sebagai pelaksana sendiri, Kabupaten Sidoarjo juga mengimplementasikan regulasi dan menetapkan tim yang bertanggung jawab, program-program stunting dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam penanggulangan stunting.

Kata Kunci: Program Stunting; Kebijakan; Desa Prioritas

Pendahuluan

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi dan infeksi berulang dalam jangka waktu lama. Gangguan ini ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Meskipun prevalensi stunting balita di Indonesia terus menurun, angkanya masih tergolong tinggi dan tersebar hampir di seluruh wilayah serta berbagai kelompok sosial ekonomi (Alifah et al., 2023). Penyebab stunting bersifat multidimensional, tidak hanya dipicu oleh kemiskinan dan akses pangan yang terbatas, tetapi juga oleh pola asuh dan pemberian makan pada balita yang kurang tepat. Dampak stunting sangat signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia, karena menurunkan produktivitas dan menyebabkan bonus demografi tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal. Stunting memiliki dampak yang signifikan dan luas terhadap individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak utama stunting (Aminullah & Rini, 2023).

Anak-anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak-anak seusia mereka. Stunting membuat anak lebih rentan terhadap berbagai penyakit karena sistem kekebalan tubuh yang lemah. Anak-anak yang mengalami stunting seringkali memiliki keterlambatan dalam perkembangan kognitif, yang mempengaruhi kemampuan belajar dan prestasi akademik mereka. Kekurangan gizi yang kronis dapat menyebabkan keterbelakangan mental, yang mempengaruhi kemampuan berpikir dan memecahkan masalah (Asmawati, 2023).

Individu yang mengalami stunting cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah ketika dewasa, yang berdampak negatif pada kesempatan kerja dan pendapatan. Masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya kesehatan yang lebih tinggi untuk mengatasi masalah kesehatan yang diakibatkan oleh stunting. Anak-anak yang mengalami stunting mungkin mengalami diskriminasi dan memiliki peluang yang lebih sedikit dalam kehidupan sosial dan pendidikan. Stunting seringkali lebih tinggi di kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah, yang memperburuk ketidaksetaraan sosial (Muafa et al., 2024). Stunting berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia, yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Negara yang memiliki tingkat stunting yang tinggi tidak dapat memanfaatkan bonus demografi secara optimal, karena banyak anak-anak tidak tumbuh menjadi individu produktif yang sehat. Secara keseluruhan, stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah

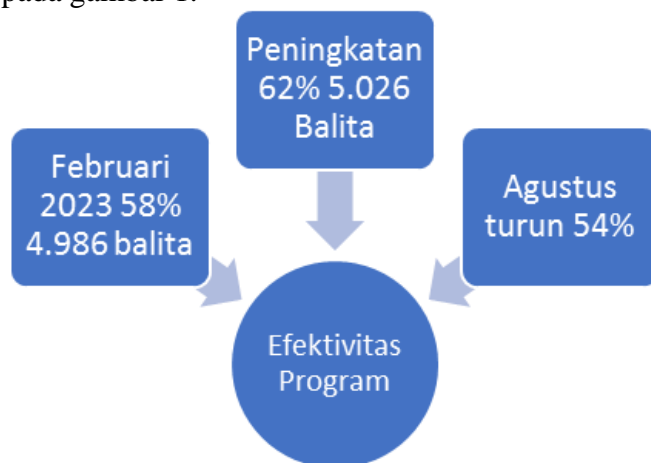
ekonomi dan sosial yang mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan stunting harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan dan pembangunan (Natsir, 2023).

Baru-baru ini Presiden Jokowi memberikan statemen pentingnya percepatan penurunan stunting pada tahun 2023 dengan menekankan bahwa dampak stunting tidak hanya terbatas pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada kemampuan belajar, keterbelakangan mental, dan kerentanan terhadap penyakit kronis. Dalam upayanya untuk mencapai target penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024, Presiden yakin bahwa dengan kerja sama yang solid, target ini dapat tercapai. Untuk itu, beberapa langkah strategis telah ditetapkan, termasuk pemanfaatan teknologi untuk pendataan yang akurat, penyediaan alat ukur di puskesmas, perhatian terhadap aspek lingkungan seperti air bersih dan sanitasi, penyediaan protein bagi ibu hamil dan bayi, serta penyuluhan tentang pra-nikah, pra-hamil, dan saat hamil (Panjaitan et al., 2022).

Sinergi antara berbagai pihak seperti Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, tenaga kesehatan, TNI-Polri, dan sektor swasta juga ditekankan. Arahan ini disampaikan Presiden pada Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, salah satu fokus utama adalah pengembangan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak (Yuliandy et al., 2023).

Langkah-langkah yang diambil meliputi percepatan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, serta peningkatan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dalam RPJMN 2020-2024, upaya percepatan penurunan stunting menjadi salah satu Proyek Prioritas dan Major Project yang berfokus pada percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Penyebab masalah gizi ini saling berkaitan antara satu dan lainnya, termasuk rendahnya akses terhadap makanan dengan kualitas gizi yang memadai, pola asuh yang kurang baik, serta akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih, hal tersebut sudah dilakukan oleh pemetintah Kabupaten Sidoarjo.

Data stunting di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2023. Pada Februari 2023, angka stunting mencapai 5,3%, dengan 4.986 balita terindikasi stunting. Namun, upaya keras dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil menurunkan angka ini menjadi 3,4% pada Agustus 2023, meskipun jumlah balita yang terindikasi stunting sedikit meningkat menjadi 5.026. Berdasarkan Data Sistem Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, kasus stunting di Sidoarjo turun menjadi 8,4%, secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kondisi Stunting Kabupaten Sidoarjo

Penurunan ini tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Salah satu langkah utama adalah memberikan bantuan peningkatan gizi kepada 20.299 Kepala Keluarga (KK) kategori Keluarga Rawan Stunting (KRS). Selain itu, pemerintah juga memberikan tablet penambah darah kepada ibu hamil dan remaja sebagai langkah pencegahan anemia yang dapat berkontribusi pada stunting, salah satunya adalah penerapan Program Kebijakan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo.

Program Kebijakan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo adalah inisiatif strategis yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah stunting di tingkat local (Rosiyati et al., 2019). Program ini menetapkan sejumlah desa sebagai prioritas, dengan fokus utama pada upaya meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak di wilayah tersebut. Melalui pendekatan holistik, program ini mencakup berbagai kegiatan seperti penyuluhan gizi kepada ibu hamil dan balita, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, modernisasi fasilitas sanitasi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kesehatan masyarakat. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi prevalensi stunting secara signifikan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat dan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta (Agus et al., 2020).

Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah stunting secara holistik, mencakup intervensi gizi, kesehatan, dan edukasi kepada masyarakat. Dengan terus memantau dan mengimplementasikan program-program strategis, diharapkan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo akan terus menurun, sehingga menghasilkan generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif. Sehingga diperlukan keberlanjutan program dengan melihat efektivitas yang dijalankan.

Kondisi penelitian saat ini ditemukan Kebijakan penggunaan dana desa memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan dan layanan publik di tingkat lokal. Dengan fokus pada teori efektivitas menurut Siagian, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat layanan publik melalui peningkatan responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Responsivitas mencakup kemampuan untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan efektif (Situmeang, 2022).

Penelitian lain ditemukan politik dan tata kelola memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas kebijakan sosial dalam mengurangi ketimpangan. Beragam praktik budaya dan kesenjangan sosial menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi serta efektivitas kebijakan sosial. Dinamika politik yang ada juga turut memengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan berdampak pada masyarakat. Iklim politik yang stabil dan tata kelola yang baik dapat memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dengan efektif, sementara ketidakstabilan politik dan tata kelola yang lemah dapat menghambat atau bahkan mengubah arah kebijakan sosial (Sarjito, 2024). Dalam implementasi kebijakan, seperti kebijakan yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya, tepat aturan, dan tepat administrasi. Temuan dari penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana program-program perlindungan sosial saat ini memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Berdasarkan hasil analisis ini, rekomendasi disusun untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan sosial di Indonesia, dengan fokus pada memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang optimal dan memperkuat kebijakan yang telah terbukti berhasil (Najwa et al., 2024).

Dari adanya kondisi penelitian yang ditemukan, belum ada yang membahas efektivitas program kebijakan menurut Teori efektivitas Siagian. Yang mana mengacu pada konsep bahwa efektivitas suatu program kebijakan dapat dinilai dari empat peran utama pemerintah: stabilisator, inovator, modernisator, dan pelaksana. Dalam konteks Program Kebijakan Desa Prioritas untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten

Sidoarjo, teori ini sangat relevan. Sebagai stabilisator, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menciptakan stabilitas politik dan sosial yang mendukung kelangsungan program tersebut (Amas et al., 2020).

Sebagai inovator, pemerintah telah mengintroduksi berbagai inisiatif baru yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak di desa-desa prioritas. Peran modernisator tercermin dalam upaya modernisasi fasilitas kesehatan dan sanitasi di tingkat desa, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi dan kesehatan. Sebagai pelaksana, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen tinggi dalam mengimplementasikan program-program intervensi dengan efektif di lapangan. Dengan mengintegrasikan keempat peran ini, Program Kebijakan Desa Prioritas telah berhasil menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mengurangi angka stunting di Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan prinsip-prinsip teori efektivitas menurut Siagian (Claryssa & Siagian, 2022).

Menurut Siagian, peran pemerintah dalam proses pembangunan dapat dibagi menjadi empat peran utama: stabilisator, inovator, modernisator, dan pelaksana sendiri. Dalam konteks kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo, pemerintah telah memainkan peran-peran ini secara efektif. Sebagai stabilisator, pemerintah memastikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang diperlukan untuk menjalankan program-program stunting dengan lancar. Peran sebagai inovator terlihat dari berbagai inisiatif inovatif yang diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak, seperti pemberian tablet penambah darah dan bantuan peningkatan gizi kepada keluarga rawan stunting (Santoso et al., 2023).

Sebagai modernisator, pemerintah mendorong modernisasi dalam praktik kesehatan dan sanitasi melalui penyediaan fasilitas yang lebih baik dan edukasi kesehatan. Terakhir, peran sebagai pelaksana sendiri tercermin dalam pelaksanaan langsung berbagai program intervensi yang menargetkan penurunan angka stunting, menunjukkan komitmen kuat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah tersebut. Melalui pendekatan yang holistik dan terstruktur ini, program kebijakan desa prioritas percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mengatasi masalah stunting, sejalan dengan teori pembangunan yang dikemukakan oleh Siagian (Anam & Anwar, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Kebijakan Desa Prioritas dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo. Dalam konteks ini, penelitian mengkaji peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, dan pelaksana dalam implementasi program-program tersebut. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana keempat peran tersebut berkontribusi terhadap efektivitas program dalam menangani masalah stunting di tingkat lokal. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap strategi dan implementasi kebijakan yang berhasil dalam konteks penurunan angka stunting, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan dan praktik yang relevan di masa mendatang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas program kebijakan desa prioritas dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo. Data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup dokumen-dokumen kebijakan, laporan pemerintah, serta artikel-artikel ilmiah yang relevan. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, dengan memilih informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan terkait implementasi program stunting di tingkat desa, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Instrumen

penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-structured, yang memungkinkan untuk pengumpulan data yang mendalam mengenai peran pemerintah dalam program stunting. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, dan pelaksana dalam implementasi program tersebut. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana peran-peran tersebut diimplementasikan secara lokal untuk mencapai tujuan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo.

Hasil dan Pembahasan

1. Stabilisator

Untuk melihat efektivitas program kebijakan desa prioritas percepatan penurunan stunting kabupaten sidoarjo. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas di berbagai sektor kehidupan masyarakat (Afero et al., 2022). Ini mencakup stabilitas politik yang memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik, stabilitas ekonomi yang menjaga inflasi tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, stabilitas sosial yang mencegah konflik antar kelompok, serta stabilitas keamanan dalam negeri yang melindungi warga negara dari ancaman internal maupun eksternal. Tanpa stabilitas di bidang-bidang ini, pembangunan tidak akan dapat berlangsung secara optimal. Secara rinci dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Stabilisator Program Kebijakan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo

Program Stabilisator Kebijakan Desa Prioritas untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sidoarjo mengusung komitmen dan visi yang kuat dalam kepemimpinan. Pilar komunikasi, perubahan perilaku, dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam mengubah paradigma dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi serta pola makan sehat. Melalui konvergensi, intervensi spesifik, dan sensitif, program ini bertujuan untuk mengintegrasikan langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan dalam menanggulangi stunting.

Ketahanan pangan dan gizi menjadi pijakan utama dalam pilar ketiga, dengan upaya memastikan akses dan kualitas layanan yang merata bagi semua sasaran prioritas stunting. Program ini juga menekankan pentingnya sistem, data, informasi, riset, dan inovasi sebagai fondasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Peningkatan cakupan intervensi pada setiap sasaran prioritas, termasuk ekspansi sasaran, fokus pada indikator kesehatan yang telah ditetapkan, dan pembinaan kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan menjadi strategi kunci.

Penguatan regulasi daerah, termasuk peran aktif desa/kelurahan dalam pengelolaan stunting, serta optimalisasi sistem data dan pelaporan menjadi landasan bagi transparansi dan akuntabilitas program. Dengan meningkatkan publikasi data stunting, program ini berupaya membangun strategi komunikasi yang efektif untuk merubah perilaku dan menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang baik. Integrasi perencanaan dan pembangunan daerah serta optimalisasi sistem data dan pelaporan adalah langkah krusial dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program ini (Alkornia, 2023)

2. Inovator

Efektivitas program kebijakan desa prioritas percepatan penurunan stunting kabupaten sidoarjo Sebagai inovator, pemerintah berperan dalam mendorong terciptanya ide-ide baru dan solusi kreatif untuk menghadapi tantangan pembangunan. Pemerintah bertindak sebagai penggagas, dengan memulai inisiatif-inisiatif yang inovatif; sebagai pengembang, dengan mendukung penelitian dan pengembangan (R&D) serta menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk inovasi; serta sebagai penyebar inovasi, dengan memastikan bahwa hasil-hasil inovasi dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kemajuan. Secara rinci dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Inovator Program Kebijakan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo

Inovator Program Kebijakan Desa Prioritas untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sidoarjo mengusulkan kerangka konseptual yang terdiri dari delapan aksi konvergensi. Stunting dianggap sebagai sinyal adanya masalah dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar, yang belum tersedia dalam skala dan kualitas yang memadai, serta belum sepenuhnya mencapai kelompok sasaran prioritas seperti Remaja, Calon Pengantin, Ibu Menyusui, Ibu Hamil, dan Anak usia 0 – 59 Bulan (Natsir, 2023).

Delapan aksi konvergensi ini merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar secara terpadu dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah intervensi dan layanan yang diberikan dapat memberikan dampak maksimal dalam menurunkan prevalensi stunting di masyarakat. Aksi-aksi ini mencakup berbagai strategi, mulai dari koordinasi yang lebih baik antarinstansi terkait dalam penyediaan pelayanan kesehatan dan gizi, hingga pengembangan program yang memprioritaskan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan masing-masing kelompok sasaran. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi tenaga kesehatan lokal serta pembinaan kelembagaan di tingkat desa juga

menjadi bagian integral dari upaya ini. Dengan demikian, melalui implementasi delapan aksi konvergensi ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang mendukung dan memungkinkan percepatan dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo, dengan memastikan bahwa setiap individu, terutama kelompok sasaran prioritas, mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas dan terjangkau secara merata.

3. Modernisator

Pemerintah memiliki peran penting dalam proses modernisasi, yaitu mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai pendorong, pemerintah mengarahkan dan memotivasi masyarakat untuk menerima dan mengadopsi teknologi serta pola pikir yang lebih maju. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk proses modernisasi, seperti infrastruktur teknologi informasi, pendidikan yang berkualitas, dan regulasi yang mendukung. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan aturan-aturan yang memastikan modernisasi berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Aming, 2022) . Secara rinci dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Modernisator Program Kebijakan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo

Indikator-operasional yang didefinisikan oleh OPD penanggung jawab dalam program Modernisator untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sidoarjo mencakup berbagai aspek kesehatan dan pelayanan sosial yang penting. Pertama, jumlah balita stunting dan persentasenya dari total balita diukur tinggi badan, yang diawasi oleh Dinas Kesehatan, memberikan gambaran tentang prevalensi stunting di wilayah tersebut.

Kedua, keluarga yang berisiko stunting, termasuk keluarga dengan faktor risiko seperti kemiskinan, pendidikan rendah, sanitasi buruk, dan air minum tidak layak, dipantau oleh Dinas P3AKB untuk menargetkan bantuan yang tepat. Aksi berikutnya termasuk pemantauan dan pengelolaan status gizi remaja putri dan calon pengantin melalui layanan seperti Tablet Tambah Darah (TTD) dan pemeriksaan anemia, yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Selain itu, pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi bagi calon pasangan usia subur (PUS) sebelum pernikahan, serta bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting, diperkuat oleh kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Kemenag. Dinas Sosial juga berperan penting dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada PUS yang membutuhkan, sementara Dinas Kesehatan fokus pada pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronik (KEK) (Firman & Ali, 2023).

Secara keseluruhan, kerangka indikator-operasional ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai upaya dari berbagai OPD agar dapat secara efektif mengurangi stunting di Kabupaten Sidoarjo. Kolaborasi antarinstansi ini menjadi kunci untuk menyediakan pelayanan yang komprehensif dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Indikator-operasional yang ditetapkan oleh OPD penanggung jawab dalam program Modernisator untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sidoarjo mencakup sejumlah aspek kunci terkait kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Pertama, monitoring konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) oleh ibu hamil, dengan fokus pada persentase ibu hamil yang berhasil mengonsumsi minimal 90 tablet TTD selama masa kehamilan, diawasi oleh Dinas Kesehatan.

Indikator kedua adalah persentase kehamilan yang tidak diinginkan terhadap total kehamilan, yang dikelola oleh Dinas P3AKB untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko kehamilan yang tidak direncanakan. Selanjutnya, pentingnya ASI eksklusif bagi bayi di bawah 6 bulan ditangani oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa persentase bayi yang hanya mendapatkan ASI, tanpa tambahan makanan atau cairan lain, memenuhi standar kesehatan yang diperlukan.

Anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) juga menjadi fokus dalam upaya pencegahan stunting, yang diperkuat oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan anak-anak menerima nutrisi tambahan yang sesuai. Selain itu, pelayanan tata laksana gizi buruk bagi balita dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan mereka dikelola dengan cermat oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan balita yang membutuhkan perawatan mendapat perhatian yang tepat (Adawiah, 2022).

Penanganan gizi kurang dan tambahan asupan gizi untuk balita, serta capaian imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak di bawah lima tahun, menjadi prioritas yang diawasi oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlindungan kesehatan yang optimal. Selanjutnya, promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta peningkatan konsumsi ikan dalam negeri di keluarga berisiko stunting juga menjadi bagian dari strategi yang dijalankan oleh OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perikanan. Secara keseluruhan, kerangka indikator-operasional ini menunjukkan komitmen OPD penanggung jawab untuk mengintegrasikan berbagai aspek kesehatan dan pelayanan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Kolaborasi antarinstansi ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan anak-anak dan ibu di wilayah tersebut.

Indikator-operasional yang didefinisikan oleh OPD penanggung jawab dalam program Modernisator untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sidoarjo mencakup sejumlah aspek yang penting dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Pertama, Dinas P3AKB memantau persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan, dengan tujuan memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai untuk meningkatkan kondisi gizi dan kesehatan mereka.

Kedua, Dinas Pangan dan Pertanian bertanggung jawab atas persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat dari sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi, seperti tanaman sayuran dan buah-buahan yang dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi di rumah tangga.

Selanjutnya, akses terhadap air minum layak dan sanitasi yang layak juga menjadi fokus dalam indikator-operasional ini, yang diawasi oleh Dinas P2CKTR. Persentase rumah tangga yang memiliki akses yang memadai terhadap air minum layak dan sanitasi yang aman akan berkontribusi pada kondisi hidup yang lebih sehat dan mencegah penyebaran penyakit.

Dinas Sosial memonitor partisipasi Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi. Ini bertujuan untuk memberikan edukasi yang diperlukan kepada keluarga penerima manfaat terkait dengan praktik kesehatan dan gizi yang baik. Terakhir, persentase keluarga penerima manfaat PKH yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur juga dipantau oleh Dinas Sosial. Hal ini mencakup karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, mineral, dan/atau Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), yang penting untuk memastikan bahwa keluarga penerima manfaat mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak dan kesehatan ibu.

Kerangka indikator-operasional ini menunjukkan komitmen OPD terkait untuk menyediakan layanan yang holistik dan terintegrasi guna mendukung upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Dengan melibatkan berbagai sektor dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan efektif, diharapkan dapat tercapai peningkatan signifikan dalam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Pelaksanaan Sendiri

Pelaksanaan program kebijakan desa prioritas percepatan penurunan stunting kabupaten sidoarjo pemerintah bertindak sebagai pelaku utama yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan. Ini berarti pemerintah tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga mengambil tindakan konkret dalam melaksanakan program-program pembangunan. Sebagai pelaksana, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan sesuai rencana, efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pemerintah juga berperan dalam mengelola anggaran pembangunan, mengawasi pelaksanaan proyek, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian yang diperlukan agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan optimal (Agustinus et al., 2024).

Pelaksanaan regulasi dan kebijakan untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo mencakup beberapa dokumen penting yang memberikan landasan hukum dan organisasi untuk implementasi program-program tersebut. . Secara rinci dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Pelaksana Sendiri Program Kebijakan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo

Pertama, Peraturan Bupati (Perbup) No. 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi memberikan arahan utama bagi semua pihak terkait untuk bekerja secara kolaboratif dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di wilayah tersebut. Dokumen ini menetapkan kerangka kerja dan strategi yang harus dijalankan oleh semua OPD terkait untuk mencapai tujuan tersebut.

Kedua, Perbup No. 90 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi menekankan peran penting desa-desa dalam menyediakan pelayanan dasar yang memadai untuk mencegah stunting. Ini termasuk upaya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, edukasi gizi, sanitasi yang baik, dan pendampingan bagi keluarga yang berisiko stunting.

Selain itu, SK Bupati Sidoarjo No. 188/197/438.1.13/2022 mengenai Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo Periode 2022-2024 menetapkan struktur tim kerja yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program-program stunting di tingkat kabupaten. Tim ini bertugas memastikan integrasi kebijakan dan program dari berbagai sektor untuk mencapai hasil yang optimal.

Terakhir, SK Bupati Sidoarjo No. 188/357/438.1.13/2022 tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Sidoarjo menegaskan pentingnya pemantauan dan evaluasi terhadap kasus-kasus stunting di wilayah tersebut. Tim ini bertugas untuk melakukan audit, analisis, dan rekomendasi perbaikan terhadap implementasi kebijakan stunting yang telah ditetapkan. Keseluruhan, regulasi dan kebijakan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan terstruktur untuk memastikan bahwa upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan berbagai peraturan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Kesimpulan

Dari rangkaian program dan kebijakan yang diimplementasikan di Kabupaten Sidoarjo untuk percepatan penurunan stunting, bahwa efektivitas yang holistik telah diadopsi melalui berbagai penerapan program seperti Stabilisator untuk memperluas cakupan intervensi, Inovator untuk mengintegrasikan kegiatan lintas sektor, dan Modernisator untuk meningkatkan manajemen data dan informasi. Sebagai pelaksana sendiri, Kabupaten Sidoarjo juga mengimplementasikan regulasi dan menetapkan tim yang bertanggung jawab. Melalui pendekatan ini, kabupaten ini mengamati komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam hal kesehatan anak dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, yang merupakan fondasi penting untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Adawiah, A. R. (2022). Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini 3-4 Tahun: Bermain Tebak Gambar Bola Hewan. *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 8(2), 74–74.
- Afero, D., Rosalia, F., & Budiono, P. (2022). Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(2), 151–159.
- Agus, F., Fanny, S., & Muliana, R. (2020). Efektivitas Implementasi Program Perumahan Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Kecamatan Tenayan Raya): Effectiveness of Subsidied Housing Programs Implementation for Low-Income Communities In Pekanbaru City (Case of Study: Tenayan Raya District). *Jurnal Saintis*, 20(02), 101–109.

- Agustinus, A., Muttaqin, M., & R, A. (2024). Implementasi Model Context, Input, Process, Product dalam Evaluasi Program Distance Learning Latsar CPNS. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 712–720.
- Alifah, R. N. A., Diana, D., & Pranoto, Y. K. S. (2023). Analisis Publikasi Karya Ilmiah tentang Pernikahan Usia Dini dan Stunting Pasca Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 6177–6184.
- Alkornia, S. (2023). Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi Anak Usia Dini Dalam Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Orang Tua. *Learning Community : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 7(1), 7–7.
- Amas, N. W., Bake, J., & Alam, S. (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa Bagi Pemerintah Desa Dalam Pelaporan Keuangan Di Kabupaten Kolaka. *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 232–232.
- Aming, A. K. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Program Kerja Organisasi Terhadap Manajemen Program Kerja Organisasi Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja Sekolah. *Jurnal Publik*, 14(1), 40–48.
- Aminullah, null, & Rini, null R. S. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Advokasi Kebijakan Stunting Di Dinas P3ap2kb Kabupaten Pasuruan. *Journal Publicuho*, 6(2), 649–657.
- Anam, S., & Anwar, K. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd dalam Pelayanan Publik. *Reformasi*, 10(1), 61–69.
- Asmawati, L. (2023). Pencegahan Stunting melalui Ketahanan Pangan Lokal Banten dan Pengasuhan Digital. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6), 6915–6926.
- Claryssa, A., & Siagian, H. L. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Integritas Keuangan. *Pekobis : Jurnal Pendidikan, Ekonomi, Dan Bisnis*, 7(2), 92–92.
- Firman, F., & Ali, U. (2023). Perencanaan Strategis dalam Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3537–3544.
- Muafa, M. A., Wahyudin, C., Salbiah, E., & Subagdja, O. (2024). Efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan Pada Anak Stunting. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4947–4953.
- Najwa, Y., Amanda, P. D., Fatmawati, F., Al-Kalam, S., & Wahyudi, S. N. (2024). Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan di Indonesia. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 1–20.
- Natsir, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Program Percepatan Pencegahan Stunting Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 13(1), 26–31.
- Panjaitan, A. A., Yanto, A., Naibaho, R., & Fitriani, N. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 3(1), 13–16.
- Rosiyati, E., Pratiwi, E. A. D., Poristinawati, I., Rahmawati, E., Nurbayani, R., Lestari, S. M., Wardani, P. S., & Nugroho, M. R. (2019). Determinants of Stunting Children (0-59 Months) in Some Countries in Southeast Asia. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 4(3), 88–94.
- Santoso, A. B., Girsang, S. S., Raharjo, B., Pustika, A. B., Hutapea, Y., Kobarsih, M., ... & Sudarmaji. (2023). Assessing the Challenges and Opportunities Of Agricultural Information Systems To Enhance Farmers' Capacity And Target Rice Production in Indonesia. *Sustainability*, 15(2), 1114.

- Sarjito, A. (2024). Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 6(2), 1–12.
- Situmeang, M. (2022). Kebijakan Pengguna Dana Desa dan Pelayanan Publik Terhadap Efektivitas Program Pembangunan di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(4), 238–248.
- Yuliandy, T., Widiowati, D., & Ismudiyati, Y. S. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Monitoring Kegiatan Pencegahan Stunting Posyandu di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)*, 5(2).